

**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH:
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
(Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)**

**Febrian Cahyo Pradono
Basukianto**

Universitas Stikubank Semarang
**(febriancp.akt@gmail.com)
(basukianto@ymail.com)**

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan tidak efisiensi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan pemerintah daerah keuangan dan masalah / kendala yang dihadapi oleh SKPD di penyusunan laporan keuangan. laporan keuangan memiliki peran penting pada perumusan kebijakan pembangunan. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat memberikan informasi akurat bagi para pembuat kebijakan. informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan ketidakakuratan perumusan kebijakan, yang membuat dampak negatif pada perkembangan institusi. Berdasarkan kualitas yang lebih rendah dari laporan keuangan pemerintah daerah, ini perlu diberikan perhatian khusus. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dari 48 SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Ada 141 data yang dikumpulkan yang detail: Bendahara Pengeluaran (46 kuesioner), Barang Administrator (47 kuesioner), dan Staf Laporan Keuangan (48 kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PPK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: kualitas Laporan Keuangan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi, peran PPK-SKPD, sistem pengawasan internal

ABSTRACT

This research was based on the insufficiency of local government financial statements in Central Java. This research aims to determine the factors that influencing on low quality of local government financial statements and the problems / constraints that faced by SKPD on preparation of financial statements. Financial statement has an important role on formulating development policies. The low quality of financial statement may provide inaccurate informations for policy makers. Inaccurate informations may result inaccuracy of policy formulation, which made a negative impact on the development of an institution. Based on lower quality of local government financial statement, this needs to be given special attention. This research was an explanatory research of 48 SKPDs in Central Java Provincial Government, using of questionnaires in data collection. There were 141 data collected which details : Expenditure Treasurers (46 questionnaires), Goods Administrators (47 questionnaires), and Financial Statement Staffs (48 questionnaires). The results showed that the competence of human resources, information technology, reconciliation and internal control systems have significant effect on quality of local government financial statement, while the role of PPK - SPKPD has no significant effect.

Keywords: Financial statement quality, competence of human resources, information technology, reconciliation, the role of PPK-SKPD, and internal control systems.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam

penyusunan laporan keuangan terutama pada tingkat SKPD. Menurut pengamatan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku konsolidan dan pengguna laporan keuangan SKPD, masih dijumpai hal-hal sebagai berikut : data yang disajikan tidak akurat, ketidakmampuan SKPD dalam menyajikan pos-pos laporan keuangan dengan tepat, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kurang lengkap dan informatif.

Dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran, SKPD mengacu pada laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari bendahara. Bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada SKPKD setiap bulannya, laporan tersebut yang menjadi dasar SKPD untuk menyusun laporan realisasi anggaran berkala (triwulanan dan semester). Permasalahan yang seringkali terjadi adalah masih terdapat koreksi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara yang menyebabkan pergeseran realisasi pendapatan dan/atau belanja, sehingga kevalidan data laporan realisasi anggaran berkala SKPD menjadi tidak akurat. Menurut data Biro Keuangan dari 48 (empat puluh delapan) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2012 terdapat 24 SKPD (50%) yang melakukan koreksi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara. Sementara pada tahun 2013 tercatat 30 SKPD (62,50%) melakukan koreksi.

Berdasarkan penilaian Biro Keuangan terhadap laporan keuangan SKPD yang dilihat dari 4 (empat) aspek sebagai berikut : kemampuan dalam menyajikan penghitungan LRA dan Neraca dengan tepat, penjelasan terhadap ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan terinci terhadap aset tetap, menunjukkan bahwasanya belum seluruh SKPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik. Hasil analisis Biro Keuangan terhadap laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2012 mendapati 16 SKPD (33,33%) berkategori baik, 22 SKPD (45,83%) berkategori cukup, dan 10 SKPD (20,83%) berkategori kurang.

Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini penting agar kualitas laporan keuangan SKPD semakin baik. Semakin membaiknya laporan keuangan SKPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan

keuangan SKPD yaitu: (1) Kompetensi Sumberdaya Manusia, (2) Teknologi Informasi yang digunakan, (3) Peran PPK-SKPD, (4) Rekonsiliasi, dan (5) Sistem Pengendalian Internal.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut".

Teknologi Informasi

Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka (Goodhue dan Thompson 1995). Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*, misalnya) yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

Peran PPK-SKPD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, antara lain: melaksanakan akuntansi SKPD; menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang

disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan SKPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bukti empiris adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ditemukan oleh Winda Ekasari (2012) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah :

H1: Semakin baik kompetensi sumberdaya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.

Hubungan Teknologi Informasi Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah :

H2: Semakin baik teknologi informasi yang digunakan maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.

Hubungan Peran PPK-SKPD Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Jika PPK-SKPD melaksanakan tugasnya secara optimal maka juga akan dihasilkan Laporan Keuangan SKPD yang baik, hal tersebut dikarenakan PPK-SKPD memegang peranan yang penting dimulai dari meneliti kelengkapan pencairan, memverifikasi bukti-bukti pengeluaran hingga menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam suatu Laporan Keuangan SKPD. Berdasarkan konsep tersebut, hipotesis 3 yang diajukan adalah :

H3: Semakin baik pelaksanaan tugas PPK-SKPD maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.

Hubungan Rekonsiliasi Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.

Dengan adanya rekonsiliasi baik itu di internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Biro Keuangan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan konsep tersebut, hipotesis 4 yang diajukan adalah:

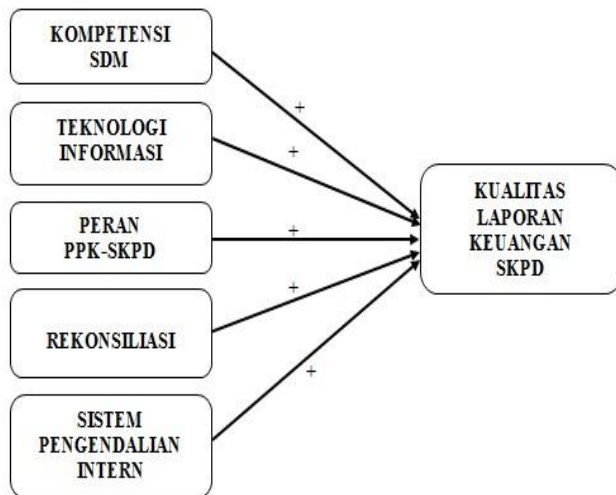
H4: Semakin baik intensitas rekonsiliasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012) tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang), ditemukan adanya pengaruh yang signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 5 yang diajukan adalah:

H5: Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah staf bagian akuntansi / keuangan pada 48 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah staf yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan SKPD. Sampel penelitian ini adalah bendahara pengeluaran, pengurus barang dan staf akuntansi penyusunan laporan keuangan. Jumlah sampel masing-masing SKPD 3 (tiga) responden.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data prime hasil isian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden bagian akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Data Kualitas Laporan Keuangan SKPD diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan 48 SKPD tahun anggaran 2012. Dalam analisis ini melibatkan staf Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut : kemampuan dalam

menyajikan penghitungan LRA dan Neraca dengan tepat, penjelasan terhadap ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan terinci terhadap aset tetap, dengan kategori : a) skor 3 diberikan untuk penilaian baik, b) skor 2 diberikan untuk penilaian cukup, dan c) skor 1 diberikan untuk penilaian kurang. Nilai tersebut kemudian dirata-rata untuk didapatkan hasil akhir penilaian laporan keuangan SKPD sebagai berikut :

SKOR	KATEGORI
$x > 2,50$	Baik
$2,50 \geq x \geq 2,00$	Cukup
$x < 2,00$	Kurang

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Penyajian Penghitungan LRA dan Neraca

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa 32 SKPD (66,67%) telah dapat menyajikan penghitungan LRA dan Neraca dengan baik, sementara itu 13 SKPD (27,08%) cukup dan 3 SKPD (6,25%) kurang.

Penjelasan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa 18SKPD (37,50%) telah dapat menyajikan penjelasan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dengan baik dan 30SKPD (62,50%) cukup.

Penjelasan Terhadap Pos-Pos Laporan Keuangan

Dari hasil analisis diperoleh data bahwa 16SKPD (33,33%) telah dapat menyajikan penjelasan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dengan baik, sementara itu 30 SKPD (62,50%) cukup dan 2 SKPD (4,17%) kurang.

Penjelasan Terinci Terhadap Aset Tetap

Dari hasil analisis diperoleh data bahwa 16 SKPD (33,33%) telah dapat menyajikan penghitungan LRA dan Neraca dengan baik, sementara 16 SKPD (33,33%) cukup dan 16 SKPD (33,33%) kurang.

Gambaran Faktor-faktor Pendukung Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 105 responden (74,47%) menyatakan bahwa jumlah pegawai/staf yang berlatar belakang akuntansi di SKPD tempat mereka bekerja belum memadai (masih kekurangan), 36 responden (25,53%) yang menyatakan sudah cukup memadai. Diketahui pula 93 responden (65,96%) menyatakan bahwa pegawai/staf di bagian keuangan belum seluruhnya dapat mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan hanya 48 responden (34,04%) yang menyatakan sudah sebagian besar pegawai / staf di bagian keuangan dapat mengoperasikan SIPKD.

Dari jawaban responden atas soal pilihan ganda yang diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi, diperoleh data bahwa 7 responden (4,96%) memperoleh skor 100; 15 responden (10,64%) skor 75; 34 responden (24,11%) skor 50; 61 responden (43,26%) skor 25; dan 24 responden (17,02) memperoleh skor 0. Hasil analisis lebih lanjut terhadap Staf Penyusun Laporan Keuangan (SPL) ternyata hanya 6 responden (12,50%) yang mampu menjawab seluruh soal dengan benar, 8 responden (16,67%) skor 75; 13 responden (27,08%) skor 50; 19 responden (39,58%) skor 25; dan 2 responden (4,17) memperoleh skor 0.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi (TIF)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75 responden (53,19%) mengungkapkan bahwa jumlah komputer di SKPD yang dapat digunakan untuk mengakses SIPKD masih kurang dan belum memadai, 66 responden (46,81%) menyatakan sudah memadai. Secara kuantitas diperoleh informasi tentang jumlah komputer di tiap – tiap SKPD sebagai berikut: 42 responden (29,79%) menginformasikan bahwa ada 1-3 komputer di SKPD, sementara itu 41 responden (29,08%) menyatakan 3-5 komputer, dan 58 responden (41,13%) menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 5 komputer di SKPD yang dapat digunakan untuk mengakses SIPKD.

Peran PPK-SKPD (PPK)

Terkait Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan verifikasi akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD, 87 responden (61,70%) menyatakan bahwa PPK-SKPD telah cukup berperan dan 51 responden (38,30%) menyebutkan bahwa peran PPK-SKPD masih belum optimal.

Rekonsiliasi (RKN)

Perihal pencocokkan / rekonsiliasi data keuangan internal (antara PPK-SKPD, Bendahara, Bendahara Pembantu, Staf Akuntansi, dan bidang/unit kerja terkait lainnya), diperoleh gambaran bahwa 90 responden (63,83%) menyatakan telah melakukan rekonsiliasi internal secara berkala 1 bulan sekali, 46 responden (32,62%) menyebutkan 3 bulan sekali melakukan rekonsiliasi, dan hanya 5 responden (3,55%) yang menyatakan jarang / tidak pernah melakukan rekonsiliasi internal SKPD.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Diketahui pula bahwa 98 responden (69,50%) menyatakan bahwa SKPD telah membuat peraturan/kebijakan/petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan internal SKPD dan 43 responden (30,50%) menyebutkan bahwa belum/tidak ada peraturan/kebijakan/petunjuk teknis dimaksud.

Peranan Faktor-faktor Pendukung Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Kemampuan Perubahan Faktor Pendukung dalam Menjelaskan Perubahan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil perhitungan nilai R dan Koefisien Determinasi ada pada Tabel 1. Koefisien korelasi yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan SPSS Versi 20 adalah sebesar 0,771. Nilai tersebut berada pada kategori hubungan sedang karena terletak antara 0,6 sampai dengan 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan (korelasi) antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) hasil hitung adalah sebesar 0,594. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perubahan kompetensi

sumberdaya manusia, teknologiinformasi, PPK-SKPD, rekonsiliasi dan sistem pengendalian internal bebas mampu menjelaskan varians kualitas laporan keuangan SKPD sebesar 59,4%, di mana sisanya yaitu sebesar 40,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Signifikansi pengaruh faktor pendukung terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada hasil table 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 39,552 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang disusun adalah layak dipergunakan untuk menjelaskan hubungan perubahan SPI, TIF, SDM, PPK dengan perubahan KLK.

Pengaruh Faktor-faktor Pendukung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil olah data dengan regresi diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi (*standardized coefficients*) semua variabel positif artinya bahwa semakin baik SDM, TIF, PPK, RKN dan SPI maka semakin baik pula KLK. Koefisien regresi yang paling besar adalah koefisien regresi SPI (0,451), kemudian berurutan TIF (0,215), SDM (0,169), RKN (0,155) dan yang paling kecil adalah koefisien regresi pada PPK (0,027). Hal tersebut menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel yang lain. Variabel PPK merupakan variabel yang paling rendah dibandingkan variabel yang lain dalam mempengaruhi KLK.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis parsial dilakukan dengan uji t dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan dengan 0,05 (*rule of thumb*).

a. Hipotesis 1

Nilai t hitung SDM adalah sebesar 2,400 dengan signifikansi sebesar 0,018(< 0,05).

Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa “**Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.**” diterima.

b. Hipotesis 2

Nilai t hitung TIF adalah sebesar 3,279 dengan signifikansi sebesar 0,001(< 0,05). Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa TIF berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “**Semakin baik teknologiinformasi yang digunakan maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.**” diterima.

c. Hipotesis 3

Nilai t hitung PPK sebesar 0,345 dengan signifikansi sebesar 0,731 (> 0,05). Dengan demikian tidak terbukti secara statistik bahwa PPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa “**Semakin baik pelaksanaan tugas PPK-SKPD maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.**” tidak diterima.

d. Hipotesis 4

Nilai t hitung RKN sebesar 2,302 dengan signifikansi sebesar 0,023 (< 0,05). Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa RKN berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa “**Semakin baik intensitas rekonsiliasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.**” diterima.

e. Hipotesis 5

Nilai t hitung SPI sebesar 5,059 dengan signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa SPI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. Dengan demikian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa “**Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD.**” diterima.

Implikasi Kebijakan

SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus segera meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan mengatasi kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi. Fokus perhatian manajer/pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah kompetensi SDM, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Fakta menunjukkan bahwa kompetensi SDM, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dibidang keuangan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum memadai.

Kebijakan yang dapat dilakukan adalah diadakannya formasi jabatan Penata Laporan Keuangan dan Verifikator Keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah diterapkan di instansi/pemerintah pusat dalam pengelolaan APBN. Penata Laporan Keuangan bertugas untuk menyajikan laporan keuangan, sementara itu Verifikator Keuangan bertugas untuk memverifikasi administrasi keuangan dan memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data telah terinput dengan benar. Analisis jabatan juga sebagai elemen yang penting sehingga nantinya akan diperoleh SDM yang berkompoten dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

Untuk pengembangan kompetensi SDM pada pemerintah daerah juga dapat mengadopsi apa yang telah dilakukan beberapa instansi swasta / BUMN, dimana pegawai yang baru diterima bekerja terlebih dahulu diberikan pendidikan / pelatihan / pembekalan sebagai dasar dalam bekerja nantinya. Selama ini yang terjadi adalah CPNS yang baru bekerja tidak mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan / pelatihan yang sesuai dengan tugas / bidang bekerjanya.

Pengembangan kompetensi SDM perlu difasilitasi dengan teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dari aspek perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang hasil akhirnya berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk

kedepan perlu dilakukan kajian apakah akan tetap menggunakan aplikasi SIPKD, beralih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ataupun mengembangkan aplikasi sendiri sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah (SIAPDA). Dari kajian kelebihan/kekurangan aplikasi-aplikasi tersebut nantinya akan dipilih opsi terbaik, baik itu dari sisi efisiensi biaya, kehandalan program, kemudahan dalam pengoperasian, transfer *knowledge*, pemeliharaan sistem, dan lain sebagainya.

Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi implementasi sistem pengendalian internal. Masih terdapat SKPD yang belum memiliki peraturan/kebijakan/petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan internal, sedangkan yang sudah memiliki belum mengimplementasikannya secara optimal. Optimalisasi implementasi SPI penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai peran yang dominan dalam hal kualitas laporan keuangan SKPD.

Perlu dilakukan evaluasi yang efektif dalam pendelegasian tugas penyiapan laporan keuangan dan pelaksanaan akuntansi dari PPK-SKPD kepada petugas yang ditunjuk. Dalam pendelegasian tugas PPK-SKPD harus benar-benar selektif dalam memilih petugas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja baik PPK-SKPD tidak berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa mereka yang diberi tugas oleh PPK-SKPD belum bekerja optimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan evaluasi kinerja secara rutin kepada pegawai/staf yang telah diberi tugas oleh PPK-SKPD.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mencapai kategori baik. Mayoritas (66,67%) laporan keuangan SKPD berada pada kategori cukup dan kurang, khususnya laporan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, penjelasan secara rinci aset tetap.
2. Faktor utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya. Faktor kedua adalah masih kurangnya tenaga dibidang keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai. Faktor ketiga adalah kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan.
3. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Sedangkan baiknya aktivitas PPK-SKPD tidak banyak berperan bagi kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Melakukan pendidikan / pelatihan / bimbingan teknis / kursus tentang keuangan daerah bagi para pegawai / staf secara rutin dan periodik untuk meningkatkan kualitas SDM di SKPD.
5. Pengadaan Belanja Modal berupa komputer/jaringan, baik itu *hardware* maupun *software*, untuk memenuhi kebutuhan SKPD atas teknologi informasi sebagai akses Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan, dan sebagainya), juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan Biro Keuangan (selaku SKPKD) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (selaku Koordinator Pengurus Barang) secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. SKPD agar merumuskan sistem pengendalian internal yang baik, yakni : pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, menerapkan mekanisme *reward* dan *punishment*, serta menentukan kebijakan dan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Saran / rekomendasi

Adapun saran/rekomendasi sebagai langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu segera mengatasi kurangnya pegawai/staf berlatar belakang akuntansi di suatu SKPD. Cara yang dapat dilakukan antara lain: pengalokasian formasi untuk pengadaan CPNS tahun selanjutnya dan mutasi pegawai dari instansi pusat/daerah lain. Jika cara tersebut tidak dapat ditempuh maka dilakukan pemetaan SDM oleh SKPD/Unit Kerja terkait (Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Biro Organisasi dan Kepegawaian), sehingga bilamana ada suatu SKPD yang berlebih (surplus) pegawai/staf berlatar belakang

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian (kompetensi sumberdaya manusia, teknologi informasi, peran PPK-SKPD, rekonsiliasi, dan sistem pengendalian internal) hanya mampu menjelaskan variabel terikat (kualitas laporan keuangan SKPD) sebesar 59,4%, di mana sisanya yaitu sebesar 40,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-

faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD.

2. Pengumpulan data ditekankan pada penyebaran kuesioner yang bersifat sesaat sehingga sangat terbatas untuk menggali lebih dalam gambaran/kondisi riil di SKPD.
3. Data yang diperoleh dari kuesioner sangat tergantung pada asumsi bahwa responden menjawab dengan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kharis. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT.AVIA AVIAN, *Tesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
- Arief Wibowo, 2005, Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem informasi dengan pendekatan technology acceptance model (TAM). Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
- Abernethy, M.A. dan Cameron H. Guthrie .1994 .An Empirical Assessment of the "Fit" between Strategy and Management Information System Design. *Accounting and Finance*. November. pp. 49-66.
- Anthony, R.N., Dearden, J. dan Bedford, N.M. 1998. *Management Control Systems*, Homewood, Illinois: Irwin.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad. 2000. *Psikologi Industri*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Atkinson, A.A., R.J. Banker, R.S. Kaplan dan S.M. Young . 1995. *Management Accounting*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
- Azhar. 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, *Tesis*, Medan, USU, Medan.
- Badan Kepegawaian Negara, *Sistem Operasional Assessment Centre Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, 2003.
- Bouwens, Jan dan Margaret A. Abernethy. 2000. The Consequences of Customization on Management Accounting System Design. *Accounting Organization and Society*. pp.221-241.
- Bromwich, M. 1990. The Case for Strategic Management Accounting: The Role of Accounting Information for Strategy in Competitive Markets. *Accounting Organization and Society*. Vol. 15.27-46.
- Byrd, T.R. and Douglas E. Turnes. 2001. An Exploratory Analysis of the Value of the Skills of IT Personnel: Their Relationship to IS Infrastructure and Competitive Advantage. *Decision Sciences*. Vol. 32.No.1. pp. 21-54.
- Chenhall, Robert H. dan Deigan Morris .1986. The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on the Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. *The Accounting Review*. No.1. pp.16 – 35.
- Chia, Yew Ming. 1995. Decentralization, Management Accounting System (MAS) Information Characteristics and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study. *Journal of Business Finance and Accounting*. September, pp. 811-830.
- Cooper Donal R dan Emory William C. 1995. *Metode Penelitian Bisnis*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Christiansen, J.K. dan Jan Mouritsen (1995). *Management Information Systems, Computer Technology and Management Accounting*, Dalam Dalam Ashton et al. *Issues in Management Accounting*, Second Ed. Prentice Hall.
- Fariad Zamachsari (2012), SPAN-SD-GL-AFD Application Extensions Functional Design SPAN Project SPGLR00006 Berita Acara Rekonsiliasi, Last Update 27 Agustus 2012.

- Faisal. 2006. *Analisis Pengaruh Intensitas Persaingan Dan Variabel Kontekstual Terhadap Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Dan Kinerja Unit Bisnis*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Gordon, L.A. dan Danny A. Miller (1976). *A Contingency Framework for the Design of Accounting Information Systems*. *Accounting Organizations and Society*, pp.56-59.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: UNDIP.
- Goodhue and Thompson. 1995. *Task-Technology Fit and Individual Performance*. *MIS Quarterly*. 213-236.
- Hay Group, *Competency-based Human Resource Management*, 1992.
- Haag, Stephen dan Maeve Cummings .1998. *Management Information Systems for the Information Age*. Irwin McGraw-Hill International Ed.
- Handoko, T. Hani. 1992. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hansen, D.R. dan Maryanne M. Mowen. 1997. *Management Accounting*. Fourth ed. International Thomson Publishing.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2001. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayes, D.C. 1977. *The Contingency Theory of Managerial Accounting*, *The Accounting Review*. pp.22-39.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, dalam *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli. Pontianak.
- Iwan Hanafi. 2011. *Competence Based Human Resource Management (CBHRM)*
- Igbaria, M. 1993. *User Acceptance of Microcomputer Technology: An Empirical Test*. Omega. pp. 73-90.
- Ivancevich, Gibson James and Donnely John. 1999. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Jogiyanto. 2000. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Juniarti dan Evelyne. 2003. *Hubungan Karakteristik Informasi Yang Dihasilkan Oleh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Manufaktur di Jawa Timur*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol 5 No.2. Hal 110-122.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A tahun 2003 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Struktural PNS*.
- Kaplan, Robert. S. (1984). *The Evolution of Management Accounting*. *The Accounting Review*. July. pp. 390-418.
- Karimi, Jahangir, Toni M. Somers dan Yash Gupta. 2001. *Impact of Information Technology Management Practices on Customer Service*. *Journal of Management Information System*. Vol. 17. No. 4. pp. 125-158.
- Lembaga Administrasi Negara, *Kajian Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta, 2010.
- Laksmiana, Arsono dan Muslichah. 2002. *Pengaruh Saling Ketergantungan, Kepercayaan Dan Keselarasan Tujuan Terhadap Kooperasi dan Kinerja Organisasi Manufaktur Pada Hubungan Kontraktual Dengan Pemasoknya*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4.No.1. Hal.1-16.
- Laksmiana, Arsono dan Muslichah. 2002. *Pengaruh Teknologi Informasi, Saling*

- Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4.No. 2. Hal 106-125.
- Marsono. 2011 Competency Assessment : Langkah Strategis Dalam Peningkatan Kualitas Sdm Pelayanan Publik, Lembaga Peneliti LAN
- Martin, E.W., Daniel W. De Hayes, Jeffrey A. Hoffer dan William C. Perkins. 1994. *Managing Information Technology: What Manager Need to Know*. Second Edition. New York: Macmillan Publishing.
- McLeod, Raymond, Jr. 1995. *Sistem Informasi Manajemen*. Alih Bahasa: Henra Teguh. Jakarta: Prehalindo.
- Moekijat.1992. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi & Setyawan, J. 2000. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Cetakan ke dua. Yogyakarta: Aditya Media.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
- R. H. N, Imelda. 2004. Implementasi Balanced Scorecard Pada Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6.No. 2. Hal 106-122.
- Robbins, S. 1996. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Robbins, S.P. 2001. *Organizational Behaviour*. Ninth Edition. Prentice Hall International, Inc.
- Slamet, Drs. Yulius. 2006. "Metode Penelitian Sosial". Sebelas Maret Universitas Press : Surakarta.
- Sofyan Effendi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aspek SDM, Makalah FGD LAN, 2010.
- Spencer Jr., Lyle M., and Spencer , S.m., *Competence At Work*, Toronto, John Wiley and Sons Inc., 1993.
- Syaiful F. Prihadi, Assessment Centre: Identifikasi, Pengukuran, Pengukuran dan Pengembangan Kompetensi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Simon, R. (1987). *Accounting Control Systems and Business Strategy: An Empirical Analysis*. *Accounting Organizations & Society*, pp. 357-374.
- Susanti, Vivi Ani. 2006. Teknologi Tugas Yang Fit dan Kinerja Individual. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 8. Mei 2006. Hal.24-34.
- Tantriani, Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi FEB Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.
- Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Winardi, Nisjar, Karhi. 1997. *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Winda, Ekasari. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kampar), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UR, Riau.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati.2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.13-14 Oktober.Purwokerto.

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada

Pemerintah Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

LAMPIRAN

Tabel 1.
Korelasi dan Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 ^a	,594	,579	2,536

a. Predictors: (Constant), SPI, TIF, RKN, SDM, PPK

Tabel 2.
F Hitung dan Signifikansi
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1271,999	5	254,400	39,552	,000 ^b
	Residual	868,313	135	6,432		
	Total	2140,312	140			

a. Dependent Variable: KLIK

b. Predictors: (Constant), SPI, TIF, RKN, SDM, PPK

Tabel 3.
Analisis Regresi

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	SDM	,169	2,400	,018
	TIF	,215	3,279	,001
	PPK	,027	,345	,731
	RKN	,155	2,302	,023
	SPI	,451	5,059	,000